PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **741220**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 520.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/234 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 160.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2110 m2/2110 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 83.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF50 SPR Tahun 1993, Rp. 35.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SKYDRAVE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 14.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**5.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**622.500.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**75.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**547.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.